

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ada dalam peraturan pemerintah diberi kewenangan yang luas. Sehingga dari kewenangan otonomi yang luas tersebut memiliki konsekuensi yaitu, kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut dapat dipenuhi jika Pemda dapat mengelola potensi daerahnya yaitu potensi SDA, SDM, dan potensi sumber daya keuangan secara optimal.

Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap nasib suatu daerah dinilai cukup besar, apabila pengelolaan keuangan daerah baik, maka akan membuat aset daerah terjaga keutuhannya. Dalam menjalankan tugasnya Pemda memiliki kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk dilihat dan dinilai apakah Pemda sudah mengelola keuangan daerah dengan baik atau tidak.

Dalam pengelolaan keuangan daerah dukungan dari kemampuan keuangan yang memadai juga diperlukan, sehingga tidak hanya memerlukan SDM yang handal saja. Kemampuan Pemda dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada, dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis kualitas laporan keuangan daerah (**Tandirerung et al., 2022**).

Kinerja keuangan Pemda adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menjalankan aktivitas otonomi daerah. pengukuran kinerja keuangan juga digunakan sebagai penilaian terhadap kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah, melihat kontribusi masing-masing pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu (**Tyas & Rani, 2022**).

Ketidakstabilan keuangan tiap daerah di Indonesia mendorong pemerintah pusat untuk mengambil peran dalam mengurangi kesenjangan yang terjadi dan tercapainya standar pelayanan publik pemerintah di setiap daerah di Indonesia melalui APBD. Tujuan anggaran APBD dikelompokkan menjadi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan dalam anggaran belanja dikelompokkan menjadi lima

yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Tyas & Rani, 2022).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Menurut (Mulia, 2019) bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama setahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Anggaran Realisasi Pendapatan (LRAP). Laporan keuangan ini harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 agar lebih accountable dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran BPBD Kota Padang
Tahun 2020-2022
(Dalam Milyaran Rupiah)

Uraian	Anggaran/Target			Realisasi			%
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
BELANJA OPERASI	9.132.544.419	8.908.462.848	9.677.854.398	8.102.210.271	8.087.625.285	6.215.116.283	0.808
Belanja Pegawai	4.849.632.032	4.628.082.563	4.628.082.563	3.447.825.850	4.214.956.766	3.327.051.715	0.779
Belanja Barang	4.017.811.383	4.243.780.285	4.214.043.785	3.634.133.019	2.888.064.568	3.327.052.715	0.789
Hibah	265.101.000	203.835.500	66.336.500	238.535.500	36.600.000	15.625.000	0.543
BELANJA MODAL	1.211.949.342	1.167.025.560	769.391.550	811.477.110	769.391.550	470.086.705	0.651
Belanja Peralatan dan Mesin	1.211.949.342	1.167.025.560	703.391.550	668.784.600	703.391.550	470.086.705	0.597

Sumber: Data LRAP BPBD Kota Padang 2020-2022 (Data diolah)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan BPBD Kota Padang, terlihat bahwa persentase yang dihasilkan laporan realisasi anggaran BPBD Kota Padang dari 2020-2022 belum maksimal sebab pengelolaan keuangan tiap tahunnya tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran pendapatan mengalami kenaikan dan penurunan dari target yang ditetapkan. Pada Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar 0,808%.

Penurunan terjadi pada Belanja Modal sebesar 0.651% yang mana realisasi anggaran pendapatan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan adanya perubahan naik turunnya realisasi anggaran pendapatan, penulis berasumsi bahwa realisasi anggaran pendapatan BPBD Kota Padang akan menentukan naik turunnya kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial (**Ariska, 2021**).

Pelaksanaan otonomi daerah sering kali mengalami permasalahan. Hal ini terjadi karena peraturan atau kebijakan yang diterapkan tidak diimplementasikan dengan baik, sehingga berdampak pada hasil kinerja yang menurun. Keberhasilan Pemda dalam menjalankan kegiatannya selama satu tahun periode dapat dilihat dari aspek kinerja keuangan daerahnya. kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menilai dan mengembangkan pelaksanaan kegiatan suatu entitas agar mencapai visi dan

misi yang diinginkan sesuai dengan aturan yang baik dan benar. Kinerja Pemda di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari realita di masyarakat mengenai pelayanan publik, mulai dari infrastruktur jalan dan bangunan yang rusak, sumber daya dan manajemen yang kurang berkualitas, mengecewakan antara desa dan kota, hingga pembangunan manusia yang belum merata. Inilah waktu yang tepat bagi masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan untuk selalu mengawasi, mengawasi, dan melaporkan kinerja keuangan Pemda. **(Yuli Tri Cahyono, 2021)**.

Adapun faktor yang dianggap mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang pertama pengelolaan keuangan. Menurut **(Andriyan, 2021)** pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.

(Sigit Ary Wijayanto, 2021) kemampuan pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di masing-masing pemerintah daerah. pengelolaan keuangan daerah di masa datang akan menghadapi tantangan berupa semakin berkurangnya sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi andalan, sehingga diperlukan paradigma pengelolaan keuangan daerah yang bervisi ke depan yang tidak sekedar berpikir secara konvensional, atau melanjutkan kebiasaan yang sudah berjalan (*business as usual*). Kinerja aparatur pengelola keuangan adalah penilaian persepsional berkaitan dengan pencapaian program dan kegiatan yang

dituangkan dalam daftar isian. Penggunaan Anggaran yang berbentuk output dan outcome.

Dalam hal pengelolaan keuangan yang pada dasarnya merupakan dana masyarakat, maka pemerintah perlu didorong untuk memberikan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban atas program dan anggaran yang telah ditetapkan (**Nurhadianto & Khamisah, 2019**).

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah mempunyai upaya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah secara tepat waktu dan pengguna anggaran secara efektif dan efisien. Dalam mengelola keuangan daerah dibutuhkan Standar Akuntansi Pemerintah yang digunakan sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diterima secara umum. Pelaporan keuangan yang dilakukan pemerintah harus didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai keterbukaan pelaporan (**Zeny Antika et al., 2020**).

Adapun faktor yang dianggap mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang kedua adalah sistem keuangan. Menurut (**Risnawati, Indra Lila Kusuma, 2022**) sistem keuangan daerah adalah sistem yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran dan pengikhtisarkan transaksi atau peristiwa keuangan serta laporan keuangan dalam rangka

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menggunakan Pemendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan rangkaian prosedur yang dimulai dengan proses pengumpulan, pencatatan, penggolongan, dan meringkas transaksi dan/atau peristiwa keuangan serta laporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka pengelolaan dana dengan sistem desentralisasi yang transparan, efisien, efektif, efektif dan akuntabel kepada masyarakat luas. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukann pemikiran yang cerdas melalui inovasi dalam sistem akuntansi. Tidak hanya pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan juga terus mengalami perubahan, hal ini dengan keluarnya SAP pada tahun 2010, yaitu sistem akuntansi keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pengelola keuangan daerah (PPKD) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPKD) dan perangkat daerah. Satuan sistem akuntansi (SKPD). Dilakukan olen Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan (PPK).

Salah satu sistem keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Menurut **(Khairunnas et al., 2021)** Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas dalam berbagai bidang pengelolaan

keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable.

Menurut (**Nanda Saputri Yanti, Anwar Made, 2020**) SAP merupakan aspek penting yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi juga dapat meningkatkan kualitas LKPD. Untuk mendapatkan informasi yang berkualitas perlu adanya sebuah sistem yang mengelola data menjadi sebuah informasi yang berharga menjadi sebuah informasi yang berharga yang dituntut menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat.

Adapun faktor yang dianggap mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang ketiga adalah belanja modal. Menurut (C. Putri et al., 2022) belanja modal adalah belanja anggaran yang digunakan untuk membeli atau menambah aset lain yang memberikan keuntungan lebih dari satu periode akuntansi dan melampaui batasan kapitalisasi minimum untuk aset tetap atau aset lain yang ditetapkan. Belanja modal merupakan semacam pengeluaran pemerintah langsung yang dikenal sebagai pengeluaran modal menghasilkan aset tetap sebagai produknya.

Menurut (**Juniartha & Sugiarto Asana, 2020**) kualitas laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Dalam Peraturan

Pemerintah No.8 Tahun 2006 laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan daerah selama satu periode. Sedangkan menurut (Gea & Putra, 2022) kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar. . Laporan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah yang bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola organisasi.

Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan pemahaman pengelolaan keuangan, sistem keuangan dan belanja modal daerah telah sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya antara lain oleh **Del Rosa et al., 2019** yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi kasus pada BPKAD di Kota Padang) dengan hasil penelitian membuktikan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial dan secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sistem keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial dan secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh **Lathifa, 2019** yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 dengan hasil penelitian membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial dan secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Peneliti selanjutnya dilakukan oleh **Leunupun et al., 2022** yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus BPKAD Kabupaten Seram) dengan hasil penelitian membuktikan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial dan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial dan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN, SISTEM KEUANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penerimaan realisasi anggaran pendapatan pada tahun 2020-2022 mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun sehingga tidak sesuai target anggaran pada BPBD Kota Padang.
2. Pengelolaan keuangan pada BPBD Kota Padang masih kurang optimal dikarenakan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
3. Sistem keuangan pada BPBD Kota Padang masih baru digunakan sehingga penyajian laporan keuangan memiliki keterbatasan dan sebagian rangkuman laporan realisasi anggaran pada 5 tahun terakhir dilakukan secara manual berupa dokumen fisik.
4. Kompetensi dalam mengelola keuangan pada sistem keuangan pada BPBD Kota Padang masih kurang optimal penggunaan SIPKD dikarenakan pegawai masih awam dengan sistem yang diberlakukan pemerintah.
5. Kualitas laporan keuangan pada BPBD Kota Padang masih kurang efektif dikarenakan teknologi informasi yang kurang memadai.

6. Rendahnya belanja modal turut berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya pada BPBD Kota Padang.
7. BPBD Kota Padang masih belum optimal dalam evaluasi dan audit keuangan dengan formula yang tepat dalam mengelola keuangan.
8. Anggaran pendapatan yang kurang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pada BPBD Kota Padang.
9. BPBD Kota Padang tidak menyediakan laporan keuangan beberapa tahun terakhir pada website resmi atau media tertentu untuk dilihat oleh publik, hal ini diartikan bahwa aksesibilitas belum optimal sehingga laporan keuangan pada pengelolaan keuangan belum berjalan baik.
10. Belanja modal yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran pada BPBD Kota Padang kurang terperinci sehingga pegawai kurang meminimalisir kesalahan persepsi.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dengan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah yaitu Kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Pengelolaan keuangan, sistem keuangan, dan belanja modal daerah sebagai variabel independen, kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang khususnya Kantor BPBD Kota Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta batasan masalah diatas, maka penulis merumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada BPBD Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPBD Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh sistem keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada BPBD Kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh sistem keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPBD Kota Padang?
5. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada BPBD Kota Padang?
6. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kualitas laporan keuangan pada BPBD Kota Padang?
7. Bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada BPBD Kota Padang?
8. Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening pada BPBD Kota Padang?

9. Bagaimana pengaruh sistem keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening pada BPBD Kota Padang?
10. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening pada BPBD Kota Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada BPBD Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPBD Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada BPBD Kota Padang
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPBD Kota Padang.
5. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada BPBD Kota Padang.
6. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kualitas laporan keuangan pada BPBD Kota Padang.

7. Untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada BPBD Kota Padang.
8. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening pada BPBD Kota Padang.
9. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh sistem keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening pada BPBD Kota Padang.
10. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening pada BPBD Kota Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki manfaat positif bagi:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis dibangku perkuliahan, terutama ilmu pengetahuan tentang Manajemen Keuangan sehingga penulis mendapatkan pengalaman baru dalam berpikir dan juga menambah daya analisis penulis.

2. Bagi Akademis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat jadi sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta merupakan perwujudan dari pengalaman Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau alat replikasi bagi peneliti di masa yang akan datang, yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan dibahas dalam penelitian ini.

4. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi pemimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dan dapat memberikan solusi alternatif dalam meningkatkan kinerja.